**EXTENSIFICATION STRATEGY ON THE IMPLEMENTATION OF PP NO
46 YEAR 2013 TO INCREASE THE REVENUE OF INCOME TAX (VAT)
FROM THE TAXPAYERS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN MALANG**

Asadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol
asadi110390@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the increase revenue of income tax by the application of 1% turnover set in PP No.46 year 2013 on the Taxpayer of Small and Medium Enterprises (SMEs). Qualitative research which is strengthened by the observation and interviews, while the type of data used are secondary and primary data. The results of the study are (1) The procedures used are in accordance with the Act that have been designated by the Director General of Taxes, by holding an area mapping, surveying and doing outreach to the actors of small and medium businesses. (2) The lack quantity of human resources in the Office of *Pelayanan Pajak Pratama* Malang and the lack awareness of the actors of Small and Medium Enterprises to taxation become obstacles towards maximum success of extensification strategy.

Keywords: Extensification Tax, Income Tax (VAT), PP No. 46 Year 2013, Small and Medium Enterprises

**STRATEGI EKSTENSIFIKASI PENERAPAN PP NO 46 TAHUN 2013
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) DARI WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MALANG**

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dengan diterapkannya pengenaan pajak 1% dari Omset yang di atur dalam PP No 46 Tahun 2013 pada wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jenis penelitian kualitatif yang mana diperkuat dengan adanya observasi dan wawancara, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian adalah (1) Prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dengan mengadakan pemetaan Wilayah, mengamati serta melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Palayanan Pajak Pratama Malang dan kurangnya kesadaran pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap perpajakan sehingga menjadi hambatan strategi ekstensifikasi untuk pencapaian yang maksimal.

Kata kunci: Ekstensifikasi Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) PP No 46 Tahun 2013, Usaha Kecil Menengah.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib rakyat pada kas negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk pembiayaan umum. Fungs pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*), sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerend*) (Mardiasmo, 2011). Dalam hal ini objek pajak yang ditentukan terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan pengenaan pajak 1% yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dari penghasilan bruto (omset).

Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan bukan merupakan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4.8 milyar selama satu tahun Pajak bersifat final dengan tarif 1%. Untuk menghitung dasar pengenaan pajak yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan (Direktur Jendral Pajak, 2013). Dalam hal ini, pemerintah khususnya daerah Kota Malang menarik simpati masyarakat melalui strategi ekstensifikasi untuk meningkatkan pajak penghasilan dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar khususnya pelaku usaha kecil dan menengah dan lainnya di kantor pelayanan pajak pratama kota Malang ada 26 ribu wajib pajak, sedangkan tenaga pengawasan masih minim. Kondisi tersebut tidak bisa mengimbangi terhadap yang diawasi. Selain dari itu masyarakat masih banyak yang belum taat dan patuh dalam perpajakan, meskipun sudah terdaftar namun tidak lapor dan tidak bayar yakni hanya menjadi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak saja. Begitu juga dengan hasil data yang ada wajib pajak usaha kecil dan menengah kurang memahami dan kurang berpartisipasi dalam pembayaran pajak dari penghasilan Bruto (omset) untuk itu perlu kiranya Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang agar

lebih dekat lagi dalam melakukan pendekatan terhadap wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah.

Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Malang menggunakan strategi ekstensifikasi Pajak untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil dan Menengah. Hambatan apa yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Malang di dalam strategi ekstensifikasi untuk peningkatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam hal administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 03/PJ.01/2010 meliputi: (1) pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP; (2) pemberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP; dan (3) pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP. Sasaran utama pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah subjek pajak baik orang pribadi, badan maupun BUT yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Penggunaan data untuk pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan data ekstern, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ./2001. Dalam istilah perpajakan di Indonesia, ekstensifikasi adalah suatu kegiatan Ditjen Pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi yang memiliki status pengurus, komisaris, pemegang saham dan pegawai serta pelaku usaha atau Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki

tempat usaha yang lokasinya di pusat perdagangan. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi ekstensifikasi Perpajakan. Tujuan dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada dasarnya adalah agar jumlah Wajib Pajak terdaftar pada DJP bertambah, dengan cara mencari subjek pajak yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak namun belum terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah (PP No. 46) Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP No 46, 1 Juni Tahun 2013) menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan bukan merupakan bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4.8 milyar dalam satu periode Pajak, dikenakan PPh yang sifatnya final dengan tarif 1%. Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final dasar pengenaan pajak yang digunakan sejumlah peredaran bruto setiap bulan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa iuran wajib bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang penghasilannya selama 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp. 4.8 Milyar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ketentuan pajak penghasilan dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Perhitungan pajak dengan peredaran bruto tertentu yang tidak dihitungkan pada perolehan keuntungan tetapi berdasarkan jumlah omzet. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan pada omzet (bukan laba) sebenarnya bukan hal lazim, model ini mudah dipahami karena pada umumnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga sulit untuk menentukan

kewajiban perpajakannya. Untuk memudahkan penghitungan pajak, tarif yang dikenakan pun lebih rendah, yaitu sebesar 1%.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud; 1) untuk memberikan kemudahan peraturan perpajakan; 2) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; 3) mengedukasi masyarakat secara transparan; 4) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Tujuan Kebijakan yang dilakukan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Kemudahan bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan; 1) meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; 2) terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Nurazizah (2011) pajak penghasilan yaitu suatu perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas segala penrimaan Negara dalam 1 (satu) periode pajak. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba usaha. Menurut Muljono (2010) Pajak penghasilan (PPh) merupakan pengenaan pajak langsung kepada pelaku usaha, baik wajib pajak yang kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang membayar pajak terutang. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada pelaku usaha kecil dan menengah atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak.

Menurut Suandy (2008) pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan jika tidak ada subjek pajak, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor yang berperan dalam mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini terbukti karena usaha kecil dan menengah lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan sektor formal. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang meningkat dari segi kuantitas (unit usaha) dan potensi yang dimiliki belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas. Terdapat masalah yang ditemukan dalam Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya kemampuan pelaku usaha. Kondisi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok karakteristik individu dan luar individu. Karakteristik individu meliputi modal usaha, kreativitas, inovasi, modal sosial dan perbedaan jenis kelamin. Sementara itu, karakteristik di luar individu adalah kerja sama antara *stakeholders*. Usaha Kecil dan Menengah memiliki kontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, investasi dan penciptaan devisa.

Dengan kontribusi Usaha Kecil dan Menengah di berbagai sektor tersebut, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ternyata masih mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya. Permasalahan dalam pengembangan Usaha dan Menengah (UKM) antara lain disebabkan oleh permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terampil, lemahnya kemampuan manajerial dan pemasaran. Peneliti menuliskan hasil penelitian lain yang menyebutkan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya bermuara pada perbedaan atau kompetensi atau kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdiri dari kemampuan mental, kemampuan emosional dan pengalaman. Pada kasus di Sulawesi Selatan, pengembangan Usaha dan Menengah (UKM) selain didukung oleh

kemampuan usaha juga didukung oleh modal sosial yang dimiliki pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Modal sosial tersebut menguntungkan dan memudahkan dalam mengakses pasar dan informasi lainnya (Syariifah 2015).

Peran keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran).

Banyaknya orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan Usaha Kecil dan Menengah. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar awalnya dimulai dari usaha kecil yang berkembang menjadi usaha besar. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuannya lebih baik bahkan dinamis untuk menyesuaikan diri pada kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang pada umumnya lebih birokratis. Ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, untuk mengatasi masalah kemiskinan akan lebih mudah, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tergolong masyarakat miskin. Kemiskinan adalah kenyataan hidup (Prasetyo 2008).

PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan; 1) mengadakan pemetaan wilayah dimana pelaku usaha kecil dan menengah berada dalam wilayah administrasi; 2) melakukan pengamatan dan pencairan data terhadap pelaku usaha kecil dan menengah baik data dari eksternal seperti dinas koperasi, dinas perindustrian serta data internal yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak; 3) melakukan penggalan potensi perpajakan dengan menggunakan data yang ada; 4) pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah memenuhi

syarat sebagai subjek pajak PPh tetapi belum terdaftar menjadi wajib pajak, dihimbau untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; 5) pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak (ber-NPWP) diawasi kewajibannya baik dalam menyetor pajak (PPh) maupun pelaporannya (SPT); 6) hasil analisa berdasarkan data konkret yang ada, jika ditemukan wajib pajak usaha kecil dan menengah yang belum menyetorkan pajaknya (PPh) dengan benar dan sesuai omset, dihimbau untuk meningkatkan jumlah setoran PPh-nya; 7) jika dari data yang ada, jika ditemukan bahwa wajib pajak usaha kecil dan menengah dalam suatu masa pajak dalam tahun pajak tertentu omsetnya melebihi 4,8 Milyar, wajib pajak segera diberikan himbauan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); 8) melakukan kegiatan penyuluhan maupun konseling kepada wajib pajak usahawan (pelaku usaha kecil dan menengah) secara *continue* dalam rangka memberikan pengetahuan akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan; 1) dalam rangka ekstensifikasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang selalu menggunakan pedoman aturan dan data yang ada, sehingga faktor kesediaan, kebenaran dan kevalidan data menjadi sangat penting dalam usaha penggalan potensi perpajakan terkait usaha kecil dan menengah; 2) dukungan dari instansi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam rangka ekstensifikasi perpajakan dan hal ini diperlukan koordinasi yang dilakukan secara *continue* dan berkelanjutan; 3) ekstensifikasi perpajakan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang besar sedangkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang masih minim; 4) faktor kesadaran dan partisipasi sukarela dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang sangat penting karena dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

memberikan dampak yang negatif atau tidak terlalu signifikan terhadap hasil ekstensifikasi perpajakan; 5) sosialisasi tentang perpajakan yang kurang juga menjadi salah satu faktor utama penghambat penerimaan pajak oleh karena itu masih sangat diperlukan sosialisasi yang massif dan terstruktur guna meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah dengan prosedur dan landasan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Pemerintah, sudah terbilang berhasil dengan bukti adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan terhitung mulai Tahun 2014 dengan hasil, Tahun 2014 Rp 38.132.169., Tahun 2015 Rp 188.773.688., Tahun 2016 (s.d 24 Feb 2016) sudah tercatat Rp 16.753.967., Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang juga mempunyai hambatan yang sangat penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (petugas perpajakan), masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan kurang partisipasi dalam perpajakan. Dari data ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah sudah berhasil menarik simpati masyarakat agar patuh dan taat perpajakan, karena pesatnya peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang sudah tertera di atas, dengan adanya hambatan tersebut Pemerintah harus lebih berusaha keras dalam pengaplikasian ekstensifikasi dalam perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi dan diperkuat dengan adanya wawancara yang bisa mewakili dari semua pihak, peneliti menginterpretasikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Malang bisa dianggap berhasil menerapkan strategi ekstensifikasi dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Meskipun masih ada hambatan namun dengan hambatan yang ada bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mempertahankan pengenaan pajak 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang bersifat final sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang pasal 4 ayat 2, pada pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

KESIMPULAN

Prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dengan mengadakan pemetaan Wilayah, mengamati serta melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang dan kurangnya kesadaran pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap perpajakan sehingga menjadi hambatan strategi ekstensifikasi untuk pencapaian yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappenas] Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (ID). 2013. Narasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. [Internet]. [dikutip pada 2014 Maret 26]. Tersedia pada: <http://www.bappenas.go.id/files/9013/5039/6528/bab-19narasi-pemberdayaan-ukmk.doc>
- Dewi, Maulida 2012. Evaluasi Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 3 No. 1 Mei 2012: 228-245
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE. 06/Pj.9/2001) Surat Edaran tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak". <http://www.ortax.org/> (online) Diakses 27 November 2015
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi *offset*: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko .2010. Hukum Pajak Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurazizah, Yayuk dkk. 2011. OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh. Jakarta: DJP
- Pamuji, Mukzam, dkk 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan) *article*
- Prasetyo, P. Eko. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. AKMINEKA UPY Volume 2;2008
- Putri, Syarifah A. B: 2014. Dampak Pemberlakuan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Skripsi Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Selvia dan Abriandi.2013 "Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu". Jurnal ISSN 2365-4385
- Suandy, Erly, 2008, Hukum Pajak, penerbit Salemba Empat edisi 4 (Empat) Jl. Raya Lenteng Agung No. 101. Jagakarsa, Jakarta 12610. ISBN 978-979-691-465-4.
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung, Jl.
- Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung. ISBN 979-8433-64-0.

- Syariifah, Azkiyyatus 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm) *article*
- Tambunan TTH. 2009. *UMKM di Indonesia*. Nazwar A, editor. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penelitiannya : Ratno, Djudi, dkk (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 105030400111025@mail.ub.ac.id).
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.